

Ekonomi Tumbuh, Rakyat Gelisah: Paradoks Politik Kontemporer

PERTUMBUHAN
PRODUKSI INVESTASI EKSPOR INFRASTRUKTUR
MENUJU INDONESIA YANG LEBIH MAJU

INVESTASI EKSPOR INDUSTRI INFRASTRUKTUR

Pertumbuhan ↔ Kesejahteraan

PEKERJAAN RAPUH

HARGA SEMBAKO
SEWA RUMAH
TRANSPORTASI
TAGIHAN LISTRIK
PENDIDIKAN
KESEHATAN

KEGELISAHAN RAKYAT

BIAYA HIDUP LAPANGAN KERJA KETIDAKPASTIAN
KETIMPANGAN TURUNNYA KEPERCAYAAN

PARADOKS UTAMA

- PDB naik
- Biaya hidup naik
- Pekerjaan rapuh
- Ketimpangan bertahan
- Kepercayaan menurun

JALAN KEBIJAKAN

- Pekerjaan bermutu
- Perlindungan sosial
- Pajak berkeadilan
- Layanan publik
- Partisipasi warga

Oleh: Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD
www.rudycct.com/cv.pdf
AI Data Analyst, IBM-ASMI

MENUJU INDONESIA
YANG LEBIH SEJAHTERA

Ekonomi Tumbuh, Rakyat Gelisah: Paradoks Politik Kontemporer

Oleh

Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD

www.rudycct.com/cv.pdf

IBM-ASMI 2026

[RudyCT Academic Series 2026](#)

Abstrak

Artikel ini membahas paradoks politik kontemporer ketika indikator makroekonomi menunjukkan pertumbuhan, tetapi banyak warga tetap merasakan ketidakamanan, mahal nya biaya hidup, pekerjaan yang rapuh, dan masa depan yang tidak pasti. Pertumbuhan produk domestik bruto penting, tetapi ia bukan ukuran tunggal kesejahteraan. Pertumbuhan dapat bersamaan dengan stagnasi upah riil, perluasan pekerjaan informal, konsentrasi kekayaan, kesenjangan wilayah, tekanan perumahan, dan penurunan kepercayaan terhadap institusi. Dengan menempatkan Indonesia sebagai kasus utama, artikel ini menghubungkan ekonomi politik pertumbuhan dengan distribusi, pasar kerja, kelas menengah, digitalisasi, komoditas, kebijakan fiskal, kualitas layanan publik, serta persepsi keadilan. Argumen sentralnya ialah bahwa kegelisahan rakyat bukan anomali psikologis yang bertentangan dengan data pertumbuhan, melainkan sinyal bahwa mekanisme transmisi pertumbuhan menuju keamanan hidup belum bekerja secara merata. Ketika pertumbuhan dibaca sebagai keberhasilan pemerintah, sedangkan biaya penyesuaian ditanggung rumah tangga, muncul jarak antara statistik nasional dan pengalaman sehari-hari. Jarak tersebut dapat menjadi sumber populisme, ketidakpercayaan, protes, dan politik identitas. Artikel ini menawarkan kerangka kebijakan yang memadukan stabilitas makroekonomi, penciptaan pekerjaan bermutu, perlindungan sosial adaptif, penguatan produktivitas usaha kecil, perumahan terjangkau, pelayanan dasar, reformasi perpajakan, dan partisipasi publik. Kesimpulannya, legitimasi politik ekonomi tidak ditentukan oleh pertumbuhan saja, tetapi oleh pertanyaan apakah warga merasakan kemajuan sebagai peningkatan kemampuan mengendalikan kehidupan mereka.

Kata Kunci: pertumbuhan ekonomi; kegelisahan publik; ekonomi politik; ketimpangan; kelas menengah; pekerjaan bermutu; legitimasi; Indonesia; kesejahteraan

Daftar Isi Ringkas

1. Pendahuluan: Ketika Statistik dan Pengalaman Berpisah
2. 1. Makna Pertumbuhan Ekonomi dan Batas Ukuran PDB
3. 2. Pertumbuhan Lima Persen dan Persoalan Kualitas
4. 3. Daya Beli, Inflasi, dan Psikologi Ketidakamanan
5. 4. Pasar Kerja: Bekerja tetapi Tidak Aman
6. 5. Kelas Menengah yang Rapuh dan Mobilitas Sosial
7. 6. Ketimpangan, Oligarki, dan Rasa Tidak Adil
8. 7. Wilayah, Komoditas, dan Ketidakseimbangan Pembangunan
9. 8. Perumahan, Pangan, Kesehatan, dan Beban Rumah Tangga
10. 9. Negara, Pajak, dan Kepercayaan Publik
11. 10. Digitalisasi, Platform, dan Ekonomi Baru
12. 11. Politik Populisme dan Janji Jalan Pintas
13. 12. Gender, Generasi, dan Ekonomi Perawatan
14. 13. Lingkungan, Krisis Iklim, dan Biaya yang Tidak Terlihat
15. 14. Demokrasi, Media, dan Perasaan Tidak Didengar
16. 15. Agenda Kebijakan: Dari Pertumbuhan ke Keamanan Sosial
17. 16. Kesimpulan: Legitimasi Tidak Tumbuh Otomatis Bersama PDB

Glossarium

Daftar Pustaka

1. Pendahuluan: Ketika Statistik dan Pengalaman Berpisah

Angka pertumbuhan ekonomi biasanya dibaca sebagai kabar baik. Produk domestik bruto meningkat, investasi masuk, ekspor bertambah, dan pemerintah menyatakan bahwa fondasi ekonomi tetap kuat. Pernyataan tersebut dapat benar secara statistik, tetapi belum tentu menjawab pertanyaan yang paling dekat dengan kehidupan rumah tangga: apakah pekerjaan lebih aman, pendapatan cukup untuk membeli kebutuhan, anak memperoleh pendidikan yang baik, biaya berobat dapat ditanggung, dan masa depan terasa lebih dapat diprediksi? Di antara dua jenis pertanyaan itu terdapat ruang politik yang sering diabaikan.

Indonesia memberi contoh yang jelas mengenai jarak antara makroekonomi dan pengalaman sosial. Perekonomian mampu tumbuh sekitar lima persen pada sebagian besar periode pemulihan pascapandemi. World Bank melaporkan pertumbuhan Indonesia tetap sekitar lima persen pada tiga kuartal pertama 2025 dan memperkirakan ketahanan berlanjut, dengan dukungan investasi dan ekspor. Namun, pertumbuhan agregat itu berlangsung bersamaan dengan kekhawatiran mengenai kualitas pekerjaan, daya beli, perumahan, biaya pendidikan, dan keamanan pendapatan. Dengan demikian, “rakyat gelisah” tidak harus berarti ekonomi sedang runtuh; kegelisahan dapat muncul ketika manfaat pertumbuhan tidak dirasakan proporsional atau risiko kehidupan meningkat.

Paradoks ini penting bagi politik. Pemerintah memerlukan pertumbuhan untuk membiayai pembangunan, membayar utang, menyediakan pekerjaan, dan menjaga stabilitas. Warga memerlukan lebih dari sekadar pertumbuhan: mereka menginginkan pembagian kesempatan yang dianggap adil, perlindungan saat terkena guncangan, dan keyakinan bahwa aturan tidak dibuat terutama untuk kelompok yang telah kuat. Bila pemerintah terus mengulangi angka agregat sementara warga berbicara tentang harga pangan, cicilan, upah, dan pekerjaan kontrak, komunikasi politik kehilangan kredibilitas.

Artikel ini tidak memosisikan pertumbuhan dan kesejahteraan sebagai dua tujuan yang saling bertentangan. Pertumbuhan tetap diperlukan. Masalahnya adalah jenis pertumbuhan, sumbernya, distribusinya, dan institusi yang mengubah hasil produksi menjadi keamanan hidup. Pertumbuhan yang padat modal tetapi miskin penciptaan pekerjaan dapat meningkatkan output tanpa memperluas kesempatan. Pertumbuhan yang bertumpu pada komoditas dapat meningkatkan ekspor tetapi rentan terhadap fluktuasi harga. Pertumbuhan yang berpusat di wilayah tertentu dapat memperlebar kesenjangan spasial.

Tesis artikel ini ialah bahwa kegelisahan publik merupakan indikator politik mengenai kualitas distribusi dan kualitas institusi. Ia mengandung informasi tentang hal-hal yang tidak selalu tercatat dalam statistik pendapatan: kecemasan menghadapi kehilangan pekerjaan, rasa tidak adil karena biaya yang naik lebih cepat daripada penghasilan, pengalaman mengakses layanan publik, serta kesan bahwa mobilitas sosial tertutup. Karena itu, respons yang memadai bukan sekadar mempercepat pertumbuhan, melainkan memperbaiki hubungan antara pertumbuhan, pekerjaan, perlindungan, dan suara warga.

2. 1. Makna Pertumbuhan Ekonomi dan Batas Ukuran PDB

Produk domestik bruto mengukur nilai barang dan jasa akhir yang diproduksi dalam suatu perekonomian. Ia berguna untuk mengetahui skala kegiatan ekonomi, membandingkan perubahan

antarwaktu, dan membantu pemerintah merencanakan anggaran. Namun, PDB tidak memberitahu siapa yang menikmati pendapatan, siapa yang kehilangan waktu luang, siapa yang menanggung kerusakan lingkungan, atau apakah pekerjaan yang tercipta memberi keamanan. Dua negara dapat memiliki pertumbuhan yang sama dengan pengalaman sosial yang sangat berbeda.

Pendapatan per kapita memperbaiki sebagian kelemahan karena menghubungkan output dengan jumlah penduduk. Kendati demikian, rata-rata dapat menyembunyikan distribusi. Jika pendapatan kelompok teratas meningkat cepat sementara kelompok bawah stagnan, pendapatan per kapita naik tetapi sebagian besar rumah tangga tidak merasa lebih sejahtera. Statistik rata-rata juga tidak menangkap utang rumah tangga, biaya sewa, ongkos transportasi, dan kewajiban perawatan anggota keluarga.

Amartya Sen menempatkan kemampuan manusia sebagai inti pembangunan. Kesejahteraan bukan hanya jumlah barang yang dimiliki, tetapi kebebasan nyata untuk menjalani kehidupan yang bernilai. Dua orang dengan pendapatan sama mungkin memiliki kemampuan berbeda karena kesehatan, lokasi, disabilitas, kualitas sekolah, atau akses transportasi. Pendekatan kapabilitas membantu menjelaskan mengapa pertumbuhan yang terlihat dalam data dapat gagal menjadi peningkatan kebebasan substantif.

Ukuran kesejahteraan juga perlu memasukkan kualitas institusi. Warga akan merasa lebih aman bila prosedur pelayanan jelas, sengketa dapat diselesaikan, aparat dapat dimintai pertanggungjawaban, dan keputusan pemerintah tidak berubah tanpa alasan. Kepastian institusional mengurangi biaya psikologis serta biaya transaksi. Sebaliknya, layanan yang tidak dapat diprediksi memaksa rumah tangga mencari jalan informal, membayar perantara, atau menyimpan cadangan lebih besar.

Batas PDB tidak berarti statistik makro harus ditolak. Yang diperlukan adalah dashboard kesejahteraan yang lebih luas: pertumbuhan upah riil, produktivitas, proporsi pekerjaan formal, biaya perumahan, keterjangkauan pangan bergizi, waktu tempuh, kualitas udara, akses kesehatan, ketimpangan wilayah, dan mobilitas sosial. Pengukuran yang lebih lengkap membantu pemerintah menghindari keberhasilan semu dan mengarahkan kebijakan pada pengalaman hidup.

Secara politik, perbedaan antara PDB dan kesejahteraan memengaruhi legitimasi. Bila pemimpin menyatakan ekonomi berhasil, tetapi keluarga harus mengurangi konsumsi protein, menunda perawatan, atau menambah pekerjaan sampingan, warga menganggap narasi resmi tidak jujur. Kekecewaan itu bukan semata masalah komunikasi. Ia menunjukkan bahwa distribusi hasil pertumbuhan dan perlindungan terhadap risiko belum memadai.

3. 2. Pertumbuhan Lima Persen dan Persoalan Kualitas

Indonesia memiliki rekam jejak pertumbuhan yang relatif tahan terhadap berbagai guncangan. Pemulihan setelah pandemi, aktivitas konsumsi, investasi, ekspor komoditas, dan belanja pemerintah membantu menjaga ekonomi tetap bergerak. World Bank mencatat ekonomi Indonesia tumbuh lima persen pada semester pertama 2025 dan memperkirakan pertumbuhan tetap sekitar 4,8 persen hingga 2027 dalam skenario yang menghadapi ketidakpastian global. Angka ini menunjukkan daya tahan, tetapi tidak otomatis menjawab kualitas transformasi struktural.

Pertumbuhan dapat berasal dari peningkatan volume produksi tanpa peningkatan besar pada produktivitas tenaga kerja. Jika sektor yang tumbuh menggunakan teknologi dan modal intensif, output meningkat tetapi kesempatan kerja baru terbatas. Industri ekstraktif juga dapat menghasilkan nilai ekspor besar dengan keterkaitan domestik yang tidak cukup dalam. Daerah penghasil mungkin memperoleh penerimaan, tetapi masyarakat lokal belum tentu memiliki pekerjaan yang stabil atau akses layanan yang sebanding.

Kualitas pertumbuhan tampak pada komposisi sektor dan hubungan antarsektor. Manufaktur yang terhubung dengan pemasok lokal dapat menciptakan pekerjaan, meningkatkan keterampilan, dan mendorong usaha kecil. Sebaliknya, ekonomi yang terlalu bergantung pada bahan mentah rentan terhadap perubahan harga global dan tidak cukup mendorong inovasi. Hilirisasi dapat memperbesar nilai tambah, tetapi harus dinilai melalui penciptaan pekerjaan, transfer teknologi, standar lingkungan, dan manfaat fiskal yang benar-benar kembali kepada masyarakat.

Pertumbuhan juga harus dilihat melalui konsumsi rumah tangga. Bila konsumsi meningkat karena pendapatan dan pekerjaan yang produktif, ia memperkuat permintaan domestik. Bila konsumsi bertahan karena utang, tabungan yang menipis, atau bantuan sementara, ketahanan itu rapuh. Rumah tangga dapat tampak tetap berbelanja sambil sebenarnya menunda pendidikan, mengurangi kualitas pangan, atau menjual aset.

Pemerintah sering berada dalam dilema. Kebijakan yang menahan inflasi dapat mengurangi daya beli jangka pendek, sedangkan stimulus dapat menambah tekanan fiskal. Kenaikan pajak tertentu dapat memperkuat kapasitas negara tetapi memicu keluhan bila pelayanan tidak membaik. Reformasi struktural membutuhkan waktu, sedangkan warga menilai kinerja berdasarkan tagihan bulan ini. Politik ekonomi harus mampu menghubungkan tujuan jangka panjang dengan perlindungan jangka pendek.

Karena itu, target pertumbuhan sebaiknya disertai target kualitas. Pemerintah dapat mengumumkan berapa banyak pekerjaan formal yang diciptakan, berapa peningkatan produktivitas usaha kecil, bagaimana upah riil berkembang, serta apakah kesenjangan wilayah menurun. Ukuran tersebut membuat pertumbuhan lebih mudah dipertanggungjawabkan dan mengurangi kecenderungan menjadikan PDB sebagai satu-satunya narasi keberhasilan.

4. 3. Daya Beli, Inflasi, dan Psikologi Ketidakamanan

Inflasi tidak dialami sebagai angka rata-rata. Rumah tangga merasakan harga beras, telur, minyak, sewa, transportasi, listrik, biaya sekolah, dan obat. Struktur konsumsi setiap keluarga berbeda, sehingga inflasi resmi dapat berbeda dari inflasi yang mereka alami. Keluarga berpendapatan rendah mengalokasikan porsi lebih besar untuk kebutuhan pokok. Kenaikan kecil pada komoditas tersebut memiliki dampak besar terhadap rasa aman.

Bahkan ketika inflasi turun, tingkat harga tidak kembali ke keadaan sebelumnya. Rumah tangga memahami perbedaan antara laju kenaikan yang melambat dan harga yang kembali murah. Jika pendapatan belum menyesuaikan, pengalaman kehilangan daya beli tetap bertahan. Inilah sebabnya mengapa pernyataan bahwa inflasi “terkendali” kadang tidak diterima. Pemerintah berbicara tentang perubahan persentase, sementara warga membandingkan jumlah rupiah yang harus dibayar.

Ketidakamanan juga dipengaruhi oleh volatilitas. Harga yang berubah tajam menyulitkan pedagang kecil, petani, pekerja harian, dan keluarga yang tidak memiliki tabungan. Perencanaan menjadi mahal. Rumah tangga menyimpan persediaan, meminjam, mengganti merek, atau mengurangi konsumsi. Ketika keputusan-keputusan penyesuaian berlangsung terus-menerus, kegelisahan menjadi pengalaman sosial yang lebih luas daripada sekadar kesulitan sementara.

Komunikasi kebijakan perlu mengakui pengalaman tersebut. Data inflasi harus dipadukan dengan penjelasan komoditas yang paling memengaruhi kelompok berbeda. Intervensi tidak cukup dilakukan melalui pengendalian harga sesaat. Rantai pasok, produktivitas pertanian, biaya logistik, penyimpanan, persaingan pasar, dan distribusi harus diperbaiki. Bantuan tunai dapat melindungi rumah tangga, tetapi tidak menggantikan pembenahan produksi dan distribusi.

Politik harga juga menyangkut keadilan. Warga bersedia menerima penyesuaian bila memahami alasan, melihat pengorbanan dibagi secara proporsional, dan percaya bahwa kelompok kuat tidak memperoleh perlakuan khusus. Sebaliknya, kenaikan biaya yang dibarengi berita mengenai kemewahan elite atau korupsi memperkuat persepsi bahwa sistem tidak adil.

Kegelisahan publik dapat diredam melalui kombinasi stabilitas, transparansi, dan perlindungan. Stabilitas berarti harga tidak mengalami gejolak yang dapat diperkirakan. Transparansi berarti pemerintah menjelaskan sumber masalah dan pilihan kebijakan. Perlindungan berarti keluarga memiliki akses bantuan saat guncangan terjadi. Tanpa tiga unsur itu, indikator makro yang baik tetap dapat menghasilkan suasana politik yang rapuh.

5. 4. Pasar Kerja: Bekerja tetapi Tidak Aman

Tingkat pengangguran tidak menggambarkan seluruh persoalan pekerjaan. Seseorang yang bekerja beberapa jam, memperoleh pendapatan tidak cukup, atau berpindah-pindah pekerjaan dapat dihitung sebagai bekerja. Karena itu, analisis perlu melihat setengah pengangguran, informalitas, jam kerja, upah riil, jaminan sosial, dan peluang peningkatan keterampilan. Banyak warga tidak menganggur, tetapi tetap merasa masa depan ekonomi tidak aman.

Pekerjaan informal menyediakan fleksibilitas dan menjadi sumber penghidupan penting, terutama ketika sektor formal tidak mampu menyerap tenaga kerja. Namun, informalitas sering berarti pendapatan tidak stabil, perlindungan hukum terbatas, akses pembiayaan lemah, dan tidak ada jaminan ketika sakit atau tua. Pedagang kecil, pengemudi platform, pekerja rumah tangga, buruh harian, dan pekerja keluarga memiliki kontribusi ekonomi besar tetapi sering tidak menikmati status sosial yang sebanding.

Generasi muda menghadapi transisi yang rumit. Pendidikan lebih tinggi tidak selalu menghasilkan pekerjaan yang sesuai. Persaingan untuk pekerjaan formal meningkat, sementara pekerjaan awal sering berbentuk kontrak pendek, magang tanpa kepastian, atau pekerjaan digital yang berubah cepat. Keterlambatan memperoleh pekerjaan bermutu dapat menunda pernikahan, kepemilikan rumah, dan pembentukan aset. Kegelisahan generasi muda lalu menjadi persoalan demografi sekaligus politik.

Teknologi membawa peluang produktivitas dan ancaman substitusi. Artificial intelligence dapat melengkapi pekerjaan yang memerlukan analisis, tetapi juga menekan tugas rutin. Respon kebijakan

tidak seharusnya sekadar melarang teknologi. Yang dibutuhkan ialah investasi keterampilan, perlindungan transisi, akses pelatihan yang terjangkau, dan keterlibatan pekerja dalam perubahan proses kerja. Perusahaan memperoleh efisiensi; pekerja memerlukan kesempatan untuk berpindah ke fungsi bernilai lebih tinggi.

Kebijakan upah harus menyeimbangkan perlindungan pekerja dan kemampuan usaha menciptakan pekerjaan. Dialog sosial penting agar penyesuaian tidak dilakukan secara sepihak. Produktivitas, biaya hidup, kondisi daerah, dan keberlanjutan usaha perlu dipertimbangkan bersama. Fokus hanya pada upah nominal dapat menutupi biaya perumahan dan transportasi yang lebih cepat meningkat.

Pekerjaan bermutu adalah jembatan utama antara pertumbuhan dan legitimasi. Warga merasakan pertumbuhan ketika memperoleh pendapatan stabil, kesempatan berkembang, perlindungan, serta penghargaan. Tanpa jembatan tersebut, pertumbuhan dapat dipersepsikan sebagai kemajuan milik perusahaan besar dan kelompok berpendidikan, bukan milik mayoritas pekerja.

6. 5. Kelas Menengah yang Rapuh dan Mobilitas Sosial

Kelas menengah sering dipahami sebagai kelompok yang telah keluar dari kemiskinan dan memiliki kapasitas konsumsi. Dalam politik, kelas ini dianggap penyangga stabilitas karena menginginkan aturan yang dapat diprediksi, pendidikan berkualitas, dan pemerintahan yang efektif. Namun, kelas menengah dapat rapuh. Kehilangan pekerjaan, sakit berat, perceraian, bencana, atau kenaikan biaya perumahan dapat menghapus tabungan dalam waktu singkat.

Kerapuhan kelas menengah memengaruhi perilaku ekonomi dan politik. Rumah tangga yang takut turun kelas menunda konsumsi besar, menambah pekerjaan, atau mengurangi investasi pendidikan. Mereka dapat tetap memiliki telepon pintar dan kendaraan, tetapi tidak memiliki dana darurat yang cukup. Penampilan konsumsi kemudian tidak boleh dijadikan bukti keamanan ekonomi.

Mobilitas sosial adalah pertanyaan penting. Jika pendidikan, kerja keras, dan kewirausahaan tidak lagi meningkatkan peluang generasi berikutnya, frustrasi meningkat. Anak muda melihat orang tua berpendidikan yang tetap terbebani biaya dan pekerjaannya tidak aman. Pada saat yang sama, akses kepada jaringan, modal, atau jabatan tampak lebih menentukan daripada kompetensi. Persepsi ini merusak keyakinan pada meritokrasi.

Pemerintah perlu membangun tangga mobilitas, bukan hanya jaring pengaman. Jaring pengaman mencegah jatuh terlalu dalam. Tangga mobilitas meliputi sekolah bermutu, transportasi publik, perumahan, kredit produktif, kesehatan, penitipan anak, dan pasar kerja yang memberi penghargaan pada keterampilan. Tanpa tangga, bantuan hanya mempertahankan rumah tangga pada posisi rentan.

Kelas menengah juga membutuhkan kebijakan pajak yang adil. Mereka sering merasa membayar pajak secara formal, tetapi memperoleh layanan publik yang tidak sebanding. Perasaan ini menguat bila kelompok berpenghasilan tinggi tampak mampu menghindari kewajiban. Reformasi perpajakan harus memperluas basis secara adil, meningkatkan kepatuhan kelompok kuat, dan memperlihatkan penggunaan dana secara nyata.

Secara politik, kelas menengah rapuh dapat bergerak ke arah yang berbeda. Ia dapat mendukung reformasi institusional bila percaya perubahan memperbaiki peluang. Ia juga dapat tertarik pada populisme bila pemimpin menawarkan penjelasan sederhana dan menyalahkan kelompok tertentu. Kualitas demokrasi bergantung pada apakah kegelisahan itu diterjemahkan menjadi reformasi atau antagonisme.

7. 6. Ketimpangan, Oligarki, dan Rasa Tidak Adil

Ketimpangan bukan hanya perbedaan pendapatan. Ia mencakup perbedaan kekayaan, kualitas pendidikan, akses kesehatan, koneksi politik, kepemilikan tanah, dan kemampuan memengaruhi aturan. Dua orang dapat memiliki pendapatan bulanan sama tetapi peluang hidup berbeda karena salah satu memiliki rumah dan jaringan, sementara yang lain membayar sewa dan menanggung utang.

Kekayaan memberikan keamanan yang tidak terlihat dalam pendapatan. Orang yang memiliki aset dapat menghadapi kehilangan pekerjaan dengan menjual atau mengagunkan aset. Pekerja tanpa aset harus segera mencari pendapatan pengganti. Kesenjangan ini membuat guncangan yang sama menghasilkan dampak berbeda. Pertumbuhan yang menaikkan harga aset tanpa memperluas kepemilikan dapat memperbesar jarak.

Hubungan ekonomi dan politik menjadi problem ketika kekayaan dapat membeli pengaruh. Pemilik modal memiliki akses kepada pembuat keputusan, media, dan pencalonan. Warga lalu menilai bahwa aturan ekonomi dirancang untuk kelompok yang sudah kuat. Persepsi tersebut bisa muncul bahkan tanpa bukti setiap kebijakan dikorupsi, karena pola konsentrasi dan eksklusivitas terlihat berulang.

Keadilan tidak mengharuskan semua hasil sama. Masyarakat dapat menerima perbedaan bila prosesnya terbuka, kontribusi dihargai, dan setiap orang memiliki kesempatan. Yang sulit diterima adalah perbedaan yang tampak diwariskan, dilindungi koneksi, atau diperoleh melalui aturan yang tidak berlaku sama. Keadilan prosedural menjadi unsur penting kepercayaan.

Kebijakan mengurangi ketimpangan perlu memakai beberapa instrumen. Pajak progresif, perlindungan sosial, layanan dasar, reformasi pertanahan, persaingan usaha, pendidikan bermutu, dan akses pembiayaan saling melengkapi. Transfer tunai tanpa perbaikan struktur hanya mengurangi gejala. Reformasi struktur tanpa perlindungan dapat menimbulkan biaya sosial yang berat.

Ketimpangan yang tidak terkendali memengaruhi stabilitas politik. Kelompok yang merasa tertinggal dapat mendukung perubahan radikal, sedangkan kelompok kuat menggunakan sumber daya untuk mempertahankan posisi. Negara demokratis harus membuat proses distribusi dapat dibahas dan diuji, sehingga konflik kepentingan tidak berubah menjadi konflik antarkelompok.

8. 7. Wilayah, Komoditas, dan Ketidakseimbangan Pembangunan

Pertumbuhan nasional merupakan gabungan dari wilayah dengan kecepatan berbeda. Pusat metropolitan dapat menikmati pekerjaan modern, kampus, layanan kesehatan, dan infrastruktur digital, sementara daerah lain menghadapi akses terbatas dan ketergantungan pada sektor primer.

Rata-rata nasional menutupi variasi tersebut. Warga membandingkan dirinya bukan hanya dengan masa lalu, tetapi juga dengan daerah lain yang tampak memperoleh peluang lebih besar.

Komoditas memainkan peran penting dalam ekspor dan penerimaan. Batubara, sawit, nikel, minyak, gas, dan komoditas pertanian dapat membawa devisa, tetapi juga menimbulkan risiko. Harga global berubah, cadangan berkurang, dan manfaat dapat terkonsentrasi pada perusahaan serta pemerintah daerah tertentu. Bila pengelolaan lingkungan buruk, masyarakat menanggung biaya yang tidak tercermin dalam harga pasar.

Hilirisasi merupakan strategi untuk meningkatkan nilai tambah domestik. Ia dapat menciptakan industri, keterampilan, dan rantai pasok baru. Namun, keberhasilan tidak cukup diukur dari pembangunan smelter atau kenaikan ekspor produk olahan. Perlu dilihat asal teknologi, proporsi pemasok lokal, kualitas pekerjaan, keselamatan kerja, dampak ekologis, serta pembagian penerimaan. Hilirisasi yang tidak inklusif dapat mengubah bentuk ketergantungan tanpa menghilangkannya.

Pembangunan wilayah membutuhkan konektivitas. Jalan, pelabuhan, listrik, internet, air, dan sistem logistik menurunkan biaya transaksi. Akan tetapi, infrastruktur harus terhubung dengan strategi ekonomi lokal. Jalan tanpa pasar, internet tanpa keterampilan, atau kawasan industri tanpa pemasok domestik tidak otomatis menghasilkan transformasi. Perencanaan harus menghubungkan aset wilayah dengan pendidikan dan pembiayaan.

Ketegangan pusat-daerah juga merupakan persoalan politik. Daerah ingin memperoleh bagian yang adil dari sumber daya, sedangkan pusat menjaga stabilitas fiskal dan standar nasional. Transparansi formula transfer, partisipasi masyarakat, dan evaluasi dampak dapat mengurangi kecurigaan. Otonomi yang disertai kapasitas dan pengawasan membantu warga melihat hubungan antara penerimaan negara dan layanan.

Pertumbuhan yang seimbang tidak berarti setiap daerah harus memiliki struktur ekonomi identik. Diversifikasi perlu disesuaikan dengan ekologi, budaya, dan keunggulan lokal. Tujuannya adalah memastikan bahwa tempat seseorang dilahirkan tidak menjadi hukuman permanen terhadap kesempatan hidupnya.

9. 8. Perumahan, Pangan, Kesehatan, dan Beban Rumah Tangga

Kegelisahan ekonomi sering bertumpu pada pengeluaran yang berulang. Rumah tangga dapat bertahan menghadapi satu biaya besar, tetapi kesulitan ketika sewa, pangan, transportasi, sekolah, internet, dan kesehatan meningkat bersama. Pengeluaran rutin mengurangi ruang untuk menabung. Keluarga lalu menjadi rentan terhadap kecelakaan, penyakit, atau kehilangan pekerjaan.

Perumahan merupakan contoh penting. Harga rumah dan sewa yang meningkat memaksa pekerja tinggal jauh dari pusat pekerjaan. Waktu tempuh bertambah, biaya transportasi meningkat, dan waktu untuk keluarga berkurang. Mereka yang membeli rumah menanggung cicilan panjang; mereka yang menyewa menghadapi ketidakpastian. Kebijakan perumahan harus dilihat sebagai kebijakan produktivitas dan kesejahteraan, bukan sekadar urusan properti.

Ketahanan pangan juga memiliki dimensi politik. Ketersediaan pangan nasional tidak selalu berarti setiap keluarga mampu membeli makanan bergizi. Rantai pasok, pendapatan, budaya

konsumsi, dan kualitas pasar menentukan hasil akhir. Program pangan perlu menggabungkan bantuan, produktivitas petani, penyimpanan, distribusi, dan pendidikan gizi. Pengendalian harga jangka pendek harus dihubungkan dengan kebijakan produksi.

Kesehatan adalah risiko ekonomi. Sakit mengurangi pendapatan dan menambah biaya transportasi serta perawatan. Jaminan kesehatan yang efektif melindungi rumah tangga dari kemiskinan, tetapi akses dan mutu layanan perlu diperhatikan. Waktu tunggu, jarak fasilitas, kekurangan tenaga medis, dan biaya tidak langsung dapat membuat perlindungan formal terasa tidak cukup.

Pendidikan merupakan investasi sekaligus pengeluaran. Keluarga ingin anak memperoleh kesempatan lebih baik, tetapi biaya sekolah, transportasi, perangkat, dan les dapat mengurangi pendapatan. Ketimpangan pendidikan memperkuat reproduksi kelas. Pertumbuhan yang tidak memperbaiki sekolah publik akan membuat keluarga membeli layanan secara individual, memperbesar beban dan jarak.

Kebijakan sosial harus memperhatikan urutan risiko. Bantuan tunai penting ketika krisis. Layanan universal penting untuk mencegah biaya menjadi terlalu tinggi. Kebijakan pasar kerja penting agar pendapatan dapat meningkat. Ketiga lapisan tersebut tidak saling menggantikan. Kombinasi inilah yang mengubah pertumbuhan menjadi rasa aman.

10. 9. Negara, Pajak, dan Kepercayaan Publik

Negara membutuhkan penerimaan untuk menyediakan layanan dan melakukan investasi. Namun, pajak adalah hubungan politik, bukan sekadar transaksi administratif. Warga membayar dengan harapan memperoleh keamanan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan aturan yang adil. Bila hubungan itu gagal, kepatuhan melemah. Warga melihat pajak sebagai beban yang hanya dinikmati kelompok tertentu.

Kepercayaan pajak bergantung pada perlakuan setara. Pekerja formal sering merasa penghasilan mereka mudah dipantau, sedangkan ekonomi besar dan kelompok kaya dianggap memiliki lebih banyak cara untuk menghindari kewajiban. Persepsi ini menimbulkan rasa tidak adil meskipun penerimaan meningkat. Reformasi harus memperkuat administrasi, memperluas basis secara proporsional, dan menindak penghindaran yang disengaja.

Pengeluaran publik sama pentingnya dengan penerimaan. Pajak yang dikumpulkan secara efektif tidak cukup bila anggaran tidak menghasilkan pelayanan. Transparansi anggaran harus menjawab apa yang dibangun, siapa yang menerima, berapa biaya, dan bagaimana kualitasnya. Data terbuka perlu dilengkapi mekanisme warga untuk mengajukan keberatan dan memperoleh jawaban.

Kebijakan fiskal menghadapi pertukaran. Subsidi dapat melindungi rumah tangga tetapi mahal dan kadang tidak tepat sasaran. Pemotongan belanja dapat memperbaiki posisi fiskal tetapi menekan layanan dan pekerjaan. Utang dapat membiayai investasi tetapi memerlukan pengelolaan. Keputusan yang baik menjelaskan siapa yang memperoleh manfaat dan siapa yang menanggung biaya.

Negara yang kuat bukan negara yang mengatur segala sesuatu secara sentral. Negara kuat memiliki kemampuan menetapkan aturan, memungut penerimaan, menyediakan layanan, dan

mengoreksi kegagalan pasar. Kapasitas tersebut memerlukan birokrasi profesional dan pengawasan. Jika negara kuat hanya bagi kelompok tertentu, ia menjadi alat eksklusif.

Politik kontemporer harus menghubungkan disiplin fiskal dengan keadilan. Stabilitas makro penting agar inflasi dan krisis utang tidak merusak rumah tangga. Keadilan sosial penting agar stabilitas tidak dibeli dengan pengorbanan sepihak. Legitimasi tumbuh bila masyarakat melihat kedua tujuan itu dikelola bersama.

11. 10. Digitalisasi, Platform, dan Ekonomi Baru

Digitalisasi memperluas akses pasar dan membuka bentuk pekerjaan baru. Usaha kecil dapat menjual melalui platform, konsumen memperoleh informasi, dan layanan keuangan menjangkau kelompok yang sebelumnya tidak terlayani. Namun, platform juga mengubah hubungan kuasa. Algoritma menentukan visibilitas, komisi memengaruhi pendapatan, dan data menjadi aset yang dikuasai perusahaan.

Pekerja platform sering disebut fleksibel karena dapat menentukan waktu kerja. Fleksibilitas tersebut memiliki sisi lain: pendapatan tidak pasti, biaya perawatan alat ditanggung sendiri, dan perlindungan sosial tidak selalu mengikuti. Pekerja dapat terlihat sebagai pengusaha mandiri tetapi memiliki ketergantungan kuat pada aturan platform. Regulasi perlu melindungi tanpa mematikan kesempatan inovasi.

Digitalisasi perdagangan tidak otomatis membuat usaha kecil naik kelas. Sebagian hanya berpindah dari pasar fisik ke aplikasi dengan margin tipis. Agar produktivitas meningkat, pelaku usaha membutuhkan manajemen, logistik, pembiayaan, standar kualitas, dan data. Program literasi digital harus bergerak dari penggunaan aplikasi menuju kemampuan mengelola bisnis.

Artificial intelligence menambah peluang dan risiko. AI dapat meningkatkan pelayanan publik, diagnosis, pendidikan, serta efisiensi produksi. Tetapi manfaatnya akan terkonsentrasi bila akses data, komputasi, dan keterampilan hanya dimiliki perusahaan besar. Kebijakan persaingan dan pendidikan perlu mencegah digitalisasi memperbesar oligopoli.

Kepercayaan publik terhadap ekonomi digital bergantung pada keamanan data. Kebocoran data, penipuan, manipulasi harga, dan keputusan otomatis yang tidak dapat dijelaskan menimbulkan kegelisahan baru. Pengguna harus mengetahui bagaimana data dikumpulkan dan bagaimana kesalahan dapat diperbaiki. Hak digital menjadi bagian dari hak ekonomi.

Transformasi digital yang demokratis menggabungkan konektivitas, keterampilan, perlindungan pekerja, persaingan, dan akuntabilitas algoritmik. Tanpa itu, digitalisasi dapat meningkatkan angka produktivitas sekaligus memperluas perasaan bahwa warga hanya menjadi sumber data dan tenaga murah.

12. 11. Politik Populisme dan Janji Jalan Pintas

Populisme tumbuh ketika sebagian warga merasa bahwa elite tidak memahami atau tidak peduli pada masalah mereka. Pemimpin populis menawarkan hubungan langsung dengan “rakyat” dan menyederhanakan konflik menjadi pertentangan antara rakyat murni dan elite korup. Kritik populis

dapat mengungkap kegagalan yang nyata, tetapi solusi yang ditawarkan sering tidak menjelaskan pembiayaan, kapasitas, dan konsekuensi.

Kegelisahan ekonomi menyediakan bahan bakar populisme. Pekerja yang kehilangan keamanan, kelas menengah yang takut turun, dan daerah yang merasa diabaikan mencari penjelasan. Jika partai tradisional hanya berbicara tentang pertumbuhan dan stabilitas, mereka meninggalkan ruang bagi narasi yang lebih emosional. Populisme lalu mengubah keluhan material menjadi identitas dan konflik budaya.

Tidak semua kebijakan populer adalah populis dalam arti negatif. Program bantuan, subsidi, atau industrialisasi dapat memperoleh dukungan luas dan tetap berbasis bukti. Perbedaannya terletak pada sikap terhadap institusi, kelompok minoritas, dan pengawasan. Pemimpin demokratis dapat mengakui kemarahan warga sambil tetap menghormati hukum dan data. Pemimpin populis cenderung menyatakan bahwa setiap kritik adalah pengkhianatan.

Cara terbaik menghadapi populisme bukan mencemooh pemilih. Institusi harus menunjukkan bahwa demokrasi mampu menghasilkan perbaikan. Partai perlu membawa isu biaya hidup, pekerjaan, dan layanan publik ke pusat agenda. Pemerintah harus menjelaskan batas kebijakan dan menolak janji yang tidak realistis. Media perlu memeriksa klaim, bukan hanya memperbesar drama.

Kebijakan redistribusi yang transparan dapat mengurangi daya tarik solusi ekstrem. Demikian pula, reformasi politik yang membuka partisipasi dapat mengurangi kesan bahwa keputusan hanya dibuat elite. Warga lebih bersedia menerima hasil yang belum sempurna bila mereka merasa memiliki suara dan prosesnya fair.

Populisme menjadi ancaman ketika kegelisahan tidak memperoleh saluran institusional. Karena itu, penguatan demokrasi ekonomi dan demokrasi politik harus berjalan bersama. Pekerjaan bermutu, perlindungan, serta akses deliberasi adalah pertahanan jangka panjang terhadap politik jalan pintas.

13. 12. Gender, Generasi, dan Ekonomi Perawatan

Pertumbuhan ekonomi sering mengabaikan pekerjaan perawatan yang dilakukan di rumah. Merawat anak, orang tua, anggota keluarga sakit, dan rumah tangga memungkinkan pekerjaan berbayar berlangsung. Namun, pekerjaan itu tidak selalu dihitung sebagai kontribusi ekonomi. Beban yang tidak terlihat terutama ditanggung perempuan dan memengaruhi peluang kerja, pendidikan, serta pendapatan jangka panjang.

Jika layanan penitipan anak, transportasi, dan kesehatan tidak tersedia, keluarga harus membeli layanan secara pribadi atau mengandalkan anggota keluarga. Rumah tangga berpendapatan rendah memiliki pilihan lebih sedikit. Perempuan dapat keluar dari pasar kerja atau menerima pekerjaan informal yang fleksibel tetapi berupah rendah. Pertumbuhan yang tidak menyediakan infrastruktur perawatan menghasilkan ketimpangan gender.

Generasi muda mengalami tekanan yang berbeda. Mereka memasuki pasar kerja dengan biaya pendidikan tinggi dan harga rumah yang sulit dijangkau. Pekerjaan digital dan kontrak memberikan peluang, tetapi tidak selalu menyediakan jaminan. Ketika masa transisi menjadi dewasa berlangsung terlalu lama, rasa kecewa dapat berkembang menjadi apatisme atau tuntutan politik.

Generasi tua memerlukan jaminan pensiun dan kesehatan. Penuaan penduduk mengubah komposisi kebutuhan publik. Keluarga tidak dapat menanggung seluruh beban, terutama ketika anak bekerja di kota lain atau dalam pekerjaan yang tidak stabil. Sistem perlindungan sosial harus menyesuaikan diri dengan perubahan demografi.

Kebijakan perawatan menciptakan manfaat ekonomi. Penitipan anak membuka kesempatan kerja perempuan, layanan lansia menciptakan pekerjaan, dan pencegahan penyakit mengurangi biaya rumah tangga. Investasi sosial tersebut sebaiknya dipahami sebagai infrastruktur produktif.

Politik yang mengabaikan perawatan akan salah membaca kesejahteraan. Pendapatan keluarga mungkin meningkat karena lebih banyak jam kerja, tetapi kelelahan, waktu bersama keluarga, dan kesehatan mental memburuk. Ukuran kemajuan harus menilai siapa yang menanggung pekerjaan reproduktif dan bagaimana negara serta pasar membaginya.

14. 13. Lingkungan, Krisis Iklim, dan Biaya yang Tidak Terlihat

Pertumbuhan berbasis sumber daya dan pembangunan fisik dapat menciptakan manfaat sekaligus biaya ekologis. Polusi udara, banjir, panas ekstrem, kerusakan pesisir, dan hilangnya produktivitas pertanian memengaruhi rumah tangga secara langsung. Biaya tersebut sering tidak masuk ke perhitungan proyek. Ketika kerusakan muncul, warga berpendapatan rendah biasanya memiliki kapasitas adaptasi paling kecil.

Krisis iklim memperbesar ketidakamanan ekonomi. Petani menghadapi musim yang berubah, nelayan menghadapi cuaca dan stok yang tidak pasti, pekerja luar ruang menghadapi panas, dan kota menghadapi banjir. Asuransi, tabungan, serta akses kredit menentukan kemampuan pulih. Kebijakan adaptasi harus memperhatikan kelompok yang tidak memiliki aset dan tidak dapat berpindah.

Transisi energi juga menimbulkan pertukaran. Pengurangan emisi diperlukan, tetapi daerah dan pekerja yang bergantung pada sektor fosil memerlukan jalan transisi. Pelatihan, diversifikasi ekonomi, rehabilitasi lingkungan, dan perlindungan pendapatan dapat mengurangi resistensi. Transisi yang dianggap hanya menguntungkan kelompok kota dan perusahaan teknologi akan memicu konflik.

Keadilan lingkungan menuntut partisipasi. Masyarakat lokal perlu mengetahui dampak proyek, memperoleh kompensasi yang adil, dan memiliki jalur keberatan. Konsultasi formal tanpa pengaruh nyata tidak cukup. Pemerintah harus menjelaskan manfaat, risiko, serta alternatif.

Investasi hijau dapat menjadi sumber pertumbuhan yang berkualitas bila membangun pekerjaan, keterampilan, dan industri domestik. Namun, label hijau tidak menjamin manfaat sosial. Proyek perlu dievaluasi melalui emisi, upah, keselamatan, pemasok lokal, dan dampak masyarakat.

Kegelisahan ekologis merupakan bagian dari paradoks pertumbuhan. Warga mungkin memperoleh pendapatan hari ini tetapi kehilangan kualitas lingkungan yang menopang kehidupan. Politik yang bertanggung jawab harus menilai horizon antargenerasi.

15. 14. Demokrasi, Media, dan Perasaan Tidak Didengar

Kondisi ekonomi memengaruhi politik melalui pengalaman material dan komunikasi. Warga tidak hanya menilai hasil kebijakan, tetapi juga apakah pemerintah mendengarkan. Ketika keluhan tentang

harga, pekerjaan, atau layanan dijawab dengan slogan, warga menyimpulkan bahwa suara mereka tidak penting. Perasaan tidak didengar dapat lebih merusak legitimasi daripada kegagalan yang diakui secara jujur.

Media menyusun agenda publik. Berita mengenai pertumbuhan, investasi, dan proyek besar sering lebih mudah diberitakan daripada perubahan kecil dalam biaya hidup atau kualitas pelayanan. Media investigasi dan media lokal membantu memperlihatkan pengalaman yang tidak terlihat dalam statistik. Namun, media juga menghadapi tekanan ekonomi, konsentrasi kepemilikan, dan kompetisi perhatian.

Platform digital mempercepat penyebaran keluhan sekaligus misinformasi. Video singkat tentang harga atau PHK dapat menjadi simbol nasional, walaupun konteksnya terbatas. Pemerintah tidak cukup merespons dengan menyangkal. Ia perlu menyediakan data, mengakui variasi pengalaman, dan menjelaskan tindakan. Komunikasi dua arah lebih kredibel daripada propaganda satu arah.

Deliberasi publik memberi warga kesempatan memahami pertukaran kebijakan. Misalnya, perubahan subsidi dapat dijelaskan melalui forum yang menunjukkan dampak fiskal dan pilihan kompensasi. Proses itu tidak menghilangkan konflik, tetapi membuat konflik lebih beradab dan informatif. Partisipasi yang bermakna dapat meningkatkan penerimaan terhadap kebijakan sulit.

Partai politik memiliki peran dalam menerjemahkan kegelisahan menjadi agenda. Bila partai hanya memperhatikan pemilu dan tidak membangun organisasi di antara pemilu, aspirasi menumpuk di ruang digital. Kader lokal, forum warga, dan pelayanan konstituen menjadi kanal penting.

Politik kontemporer membutuhkan institusi yang mampu mendengar sebelum kemarahan menjadi krisis. Pendengaran publik bukan dekorasi. Ia merupakan sistem peringatan dini bagi pemerintah dan partai.

16. 15. Agenda Kebijakan: Dari Pertumbuhan ke Keamanan Sosial

Agenda pertama adalah menciptakan pekerjaan bermutu. Investasi perlu dinilai bukan hanya dari nilai modal, tetapi juga jumlah pekerjaan, upah, transfer teknologi, keterkaitan pemasok, keselamatan, dan dampak lingkungan. Insentif fiskal harus dikaitkan dengan hasil yang dapat diperiksa. Perusahaan yang menerima dukungan publik perlu memberi laporan mengenai manfaat sosialnya.

Agenda kedua adalah memperkuat perlindungan sosial adaptif. Sistem harus mampu merespons kehilangan pekerjaan, bencana, penyakit, dan kenaikan harga. Data penerima perlu diperbarui, tetapi perlindungan privasi harus dijaga. Bantuan tunai, jaminan kesehatan, pelatihan, dan layanan ketenagakerjaan perlu terhubung sehingga rumah tangga tidak terjebak dalam program yang terpisah.

Agenda ketiga menyangkut produktivitas usaha kecil. Akses kredit saja tidak cukup. Pelaku membutuhkan pendampingan manajemen, pasar, teknologi, standar, logistik, dan kepastian izin. Pengadaan pemerintah dapat membuka pasar bagi usaha kecil, tetapi harus mencegah praktik pembayaran terlambat dan biaya informal.

Agenda keempat adalah perumahan dan transportasi. Pekerja tidak akan menikmati upah bila sebagian besar habis untuk sewa dan perjalanan. Perencanaan kota harus menghubungkan

perumahan, pekerjaan, sekolah, ruang hijau, dan transportasi publik. Investasi ini juga mengurangi emisi dan meningkatkan produktivitas.

Agenda kelima ialah reformasi perpajakan dan kualitas belanja. Penerimaan harus lebih adil; belanja harus dapat dilacak; korupsi harus dihukum; dan hasil program harus dievaluasi. Warga perlu melihat hubungan antara pajak dan layanan.

Agenda keenam adalah demokratisasi data. Pemerintah membuka data yang aman, menjelaskan indikator, dan mengundang evaluasi independen. Publik dapat melihat bukan hanya pertumbuhan, tetapi siapa yang memperoleh pekerjaan, bagaimana upah bergerak, dan wilayah mana yang tertinggal.

Agenda kebijakan tersebut mengubah pertumbuhan dari slogan menjadi kontrak sosial. Pemerintah menawarkan pertumbuhan, tetapi juga berjanji membangun mekanisme agar warga dapat merasakan, menghadapi, dan memengaruhi prosesnya.

17. 16. Kesimpulan: Legitimasi Tidak Tumbuh Otomatis Bersama PDB

Pertumbuhan ekonomi dan kegelisahan publik bukan dua fakta yang saling membatalkan. Keduanya dapat hadir bersamaan karena pertumbuhan mengukur perubahan aktivitas agregat, sedangkan kegelisahan mencerminkan keamanan, distribusi, dan kemampuan mengendalikan masa depan. Indonesia dapat tumbuh sekitar lima persen sambil menghadapi pekerjaan informal, kelas menengah rapuh, biaya rumah tangga, kesenjangan wilayah, dan persepsi ketidakadilan.

Paradoks politik kontemporer muncul ketika pemerintah meminta warga menilai keberhasilan melalui angka makro, sementara warga menilai melalui pengalaman harian. PDB, inflasi, investasi, dan ekspor penting, tetapi harus dibaca bersama upah riil, kualitas pekerjaan, harga kebutuhan, akses layanan, kepemilikan aset, kesehatan mental, dan partisipasi. Statistik yang lebih lengkap bukan sekadar kebutuhan teknis; ia memperbaiki dasar legitimasi.

Pertumbuhan yang berkualitas memiliki tiga ciri. Ia menciptakan kapasitas produktif, menyebarkan kesempatan, dan melindungi warga dari risiko yang tidak dapat mereka tanggung sendiri. Negara perlu menggabungkan disiplin makroekonomi dengan kebijakan sosial, penciptaan pekerjaan, reformasi perpajakan, perumahan, layanan dasar, dan transisi ekologis. Pasar perlu didorong untuk berinovasi, tetapi kekuatan pasar harus dibatasi ketika menghasilkan monopoli atau kerusakan.

Kegelisahan rakyat sebaiknya diperlakukan sebagai pengetahuan politik. Ia menunjukkan bahwa ada jarak antara janji dan pengalaman, antara pusat dan daerah, antara kelompok yang memiliki aset dan yang menjual tenaga. Menolak kegelisahan sebagai ketidakpuasan irasional justru memperbesar jarak. Pemerintah serta partai perlu mendengar, mengukur, dan merespons.

Legitimasi tidak tumbuh otomatis bersama PDB. Ia dibangun melalui proses yang membuat warga percaya bahwa kemajuan dibagi secara adil, risiko tidak ditanggung sendirian, dan keputusan dapat dipengaruhi. Ekonomi yang tumbuh menjadi demokratis secara substantif ketika warga bukan hanya menjadi objek statistik, melainkan subjek yang memiliki pekerjaan, perlindungan, suara, dan harapan.

Pendalaman Analitis

Bagian pendalaman ini menguji paradoks pertumbuhan melalui saluran yang sering luput dari laporan makroekonomi. Pertumbuhan menjadi pengalaman sosial melalui konsumsi, pekerjaan, aset, layanan, dan hubungan warga dengan negara. Jika salah satu saluran tersebut tersumbat, angka ekonomi yang baik tidak segera berubah menjadi rasa aman. Sebaliknya, perbaikan kecil pada saluran yang dekat dengan rumah tangga dapat memperkuat legitimasi secara lebih cepat daripada proyek besar yang manfaatnya belum dirasakan.

A. Konsumsi, Utang, dan Tabungan Rumah Tangga

Konsumsi rumah tangga merupakan komponen penting perekonomian Indonesia. Kenaikan konsumsi dapat mencerminkan pendapatan yang membaik, tetapi juga dapat berasal dari kredit dan penggunaan tabungan. Dua sumber tersebut memiliki implikasi berbeda. Pendapatan produktif memperkuat daya tahan; utang yang meningkat dapat membuat rumah tangga rentan ketika suku bunga, pekerjaan, atau harga berubah.

Rumah tangga sering melakukan penghalusan konsumsi. Mereka mempertahankan makanan dan pendidikan dengan meminjam, menjual aset, menunda pembayaran, atau mengurangi kebutuhan lain. Statistik konsumsi yang tetap terlihat stabil mungkin menyembunyikan penurunan kualitas hidup. Misalnya, keluarga masih makan tiga kali tetapi mengurangi protein, atau tetap membayar sekolah tetapi tidak lagi memiliki dana untuk kesehatan.

Literasi keuangan membantu, tetapi tidak cukup bila pendapatan terlalu rendah dan produk kredit tidak adil. Rumah tangga memerlukan perlindungan konsumen, informasi bunga yang jelas, serta akses tabungan berbiaya rendah. Regulasi fintech perlu mencegah praktik penagihan dan pembiayaan yang memperburuk kerentanan.

Kebijakan ekonomi yang sehat mendorong tabungan produktif dan mengurangi ketergantungan pada utang konsumtif. Jaminan sosial, pekerjaan stabil, dan layanan publik menurunkan kebutuhan menyimpan cadangan berlebihan. Dengan demikian, rumah tangga dapat mengarahkan dana kepada pendidikan, usaha, dan investasi masa depan.

B. UMKM dan Ekonomi Sehari-hari

Usaha mikro, kecil, dan menengah bukan hanya angka jumlah unit usaha. Ia adalah cara jutaan keluarga menggabungkan tenaga kerja, jaringan sosial, dan modal terbatas untuk bertahan. UMKM menyediakan pekerjaan dan layanan lokal, tetapi banyak yang beroperasi pada produktivitas rendah karena akses pasar, teknologi, dan pembiayaan terbatas.

Program bantuan sering gagal bila hanya memberikan pelatihan singkat atau kredit tanpa pendampingan. Pelaku usaha membutuhkan kepastian permintaan, standar produk, pencatatan keuangan, logistik, dan kemampuan negosiasi dengan platform maupun pemasok. Pemerintah dapat memakai pengadaan publik untuk membuka pasar, tetapi prosedur harus dibuat mudah tanpa menurunkan standar kualitas.

Digitalisasi membuka peluang, tetapi juga menciptakan biaya baru berupa komisi, iklan, pengiriman, dan ketergantungan pada peringkat algoritmik. UMKM perlu memiliki beberapa saluran penjualan dan data pelanggan sendiri agar tidak sepenuhnya bergantung pada satu platform. Koperasi modern dapat membantu agregasi pembelian, pemasaran, dan pembiayaan.

Pertumbuhan yang melibatkan UMKM akan lebih tersebar secara geografis. Ia meningkatkan pendapatan keluarga, mengembangkan keterampilan, dan menghubungkan wilayah. Kebijakan harus mengukur bukan hanya jumlah UMKM yang terdaftar, tetapi tingkat kelangsungan hidup, produktivitas, upah, dan kemampuan naik kelas.

C. Kebijakan Moneter dan Pengalaman Warga

Kebijakan moneter berusaha menjaga stabilitas harga dan sistem keuangan. Keputusan mengenai suku bunga memengaruhi nilai tukar, kredit, investasi, dan cicilan rumah tangga. Dampaknya tidak seragam. Penabung, peminjam, eksportir, importir, pekerja, dan usaha kecil menerima konsekuensi berbeda.

Ketika suku bunga naik untuk menahan inflasi, peminjam dapat mengurangi konsumsi dan investasi. Ketika suku bunga terlalu rendah, tekanan harga aset atau nilai tukar dapat meningkat. Otoritas moneter harus menjelaskan pilihan tersebut dengan bahasa yang dapat dipahami, bukan hanya melalui istilah teknis.

Koordinasi antara moneter dan fiskal penting ketika perekonomian menghadapi guncangan. Bantuan fiskal dapat melindungi kelompok rentan, sementara kebijakan moneter menjaga stabilitas. Jika koordinasi tidak jelas, publik dapat melihat pemerintah saling menyalahkan. Kepastian kebijakan membantu rumah tangga dan perusahaan merencanakan.

Independensi bank sentral perlu dihormati, tetapi independensi bukan berarti tidak perlu akuntabilitas. Publik berhak mengetahui tujuan, pertimbangan, risiko, dan evaluasi kebijakan. Komunikasi yang terbuka memperkuat kepercayaan bahkan ketika keputusan menimbulkan biaya sementara.

D. Investasi, Infrastruktur, dan Manfaat yang Terbagi

Investasi infrastruktur dapat menurunkan biaya ekonomi dan memperluas kesempatan. Jalan, pelabuhan, bendungan, jaringan listrik, dan internet menjadi produktif bila terhubung dengan kebutuhan warga dan kegiatan usaha. Proyek besar tidak otomatis menghasilkan manfaat apabila perencanaan, pemeliharaan, atau aksesnya buruk.

Analisis investasi perlu memasukkan manfaat distribusional. Siapa yang memperoleh akses? Apakah masyarakat lokal memiliki kesempatan kerja? Apakah lahan dan lingkungan dikelola secara adil? Apakah biaya pemeliharaan tersedia? Pertanyaan itu mencegah pembangunan hanya dinilai melalui nilai kontrak atau panjang jalan.

Kerja sama pemerintah dan swasta dapat mempercepat penyediaan infrastruktur, tetapi kontraknya harus transparan. Risiko yang dipindahkan kepada negara dapat mengurangi ruang fiskal di masa depan. Warga perlu mengetahui kewajiban pemerintah, tarif, standar layanan, serta mekanisme koreksi bila target tidak tercapai.

Investasi yang baik membentuk ekosistem. Kawasan industri memerlukan pendidikan kejuruan, pemasok lokal, perumahan, transportasi, dan layanan kesehatan. Tanpa ekosistem, infrastruktur menjadi pulau pertumbuhan yang tidak cukup mengubah kesejahteraan sekitar.

E. Ekonomi Politik Pangan dan Energi

Pangan dan energi memiliki arti ekonomi sekaligus simbolik. Kenaikan harga keduanya segera memengaruhi rumah tangga, transportasi, dan biaya produksi. Pemerintah berada di antara kepentingan konsumen, petani, nelayan, produsen energi, pedagang, dan penerimaan negara.

Subsidi dapat menjaga keterjangkauan, tetapi harus dirancang agar tidak terutama dinikmati kelompok berpendapatan tinggi. Targeting yang buruk membebani anggaran tanpa cukup melindungi kelompok rentan. Penghapusan subsidi tanpa kompensasi juga dapat memicu guncangan sosial. Solusi memerlukan data rumah tangga dan komunikasi yang jujur.

Ketahanan pangan tidak identik dengan swasembada setiap komoditas. Yang penting adalah akses terhadap pangan bergizi, produksi yang berkelanjutan, cadangan, distribusi, dan kemampuan menghadapi iklim. Petani perlu memperoleh harga yang layak, teknologi, irigasi, asuransi, dan akses pasar.

Transisi energi harus menjaga keadilan. Energi bersih perlu dikembangkan tanpa meninggalkan pekerja dan daerah yang selama ini bergantung pada energi fosil. Investasi baru harus menciptakan keterampilan dan industri domestik. Jika kebijakan energi hanya dilihat dari emisi, biaya sosial dapat diabaikan; jika hanya dilihat dari harga, risiko iklim diabaikan.

F. Kota, Desa, dan Geografi Kegelisahan

Kegelisahan ekonomi memiliki wajah berbeda antara kota dan desa. Kota menghadapi sewa mahal, kemacetan, persaingan kerja, dan tekanan layanan. Desa menghadapi ketergantungan pada pertanian, keterbatasan pasar, serta migrasi tenaga muda. Kebijakan seragam dapat gagal karena tidak memahami sumber risiko lokal.

Kota memerlukan perumahan terjangkau, transportasi publik, ruang kerja, dan layanan sosial. Waktu tempuh yang panjang adalah biaya ekonomi yang sering tidak dimasukkan dalam pendapatan. Pekerja yang menghabiskan berjam-jam di perjalanan memiliki waktu lebih sedikit untuk keluarga, pendidikan, dan kesehatan.

Desa memerlukan konektivitas, pengolahan hasil, pendidikan, dan tata kelola aset. Transfer fiskal dapat memperkuat desa bila digunakan secara transparan dan dikaitkan dengan kebutuhan. Namun, dana yang besar tanpa kapasitas serta pengawasan dapat meningkatkan konflik elite lokal.

Migrasi antara desa dan kota adalah strategi rumah tangga. Ia dapat memperluas pendapatan, tetapi juga memindahkan beban perawatan dan menimbulkan kerentanan pekerja migran. Kebijakan pembangunan perlu menghargai mobilitas, bukan memaksa warga tetap tinggal atau meninggalkan daerah tanpa perlindungan.

G. Kepercayaan, Korupsi, dan Kontrak Sosial

Kepercayaan publik tidak hanya ditentukan oleh hasil ekonomi. Ia juga dipengaruhi oleh cara keputusan dibuat dan apakah pejabat tampak tunduk pada aturan yang sama. Korupsi mengurangi penerimaan karena warga melihat sumber daya publik berubah menjadi manfaat privat. Bahkan dugaan konflik kepentingan dapat merusak kepercayaan bila informasi tidak tersedia.

Kontrak sosial modern menyangkut pertukaran hak dan kewajiban. Warga membayar pajak, mematuhi hukum, dan berpartisipasi; negara menyediakan keamanan, layanan, dan perlakuan

setara. Ketika salah satu sisi gagal berulang kali, hubungan menjadi transaksional. Warga hanya mematuhi ketika diawasi atau mencari perlindungan melalui koneksi.

Pengawasan publik perlu didukung data dan jalur tindak lanjut. Membuka data tanpa memberi warga kemampuan memahami atau mengajukan keberatan tidak cukup. Lembaga pengawas harus dapat bekerja tanpa tekanan politik dan melindungi pelapor.

Reformasi antikorupsi harus berjalan bersama reformasi pelayanan. Warga lebih mudah percaya bila proses perizinan sederhana, bantuan tepat, dan keluhan ditangani. Integritas bukan hanya penindakan setelah kerugian terjadi, tetapi desain sistem yang mengurangi peluang penyalahgunaan.

H. Pendidikan, Keterampilan, dan Harapan Antargenerasi

Pendidikan dipandang sebagai jalan mobilitas, tetapi hubungan antara ijazah dan pekerjaan berubah. Kualitas sekolah berbeda, kurikulum sering tertinggal, dan transisi ke pasar kerja tidak selalu mulus. Rumah tangga menanggung biaya untuk mengejar peluang, sementara hasilnya tidak pasti.

Keterampilan perlu dibangun sepanjang hidup. Pekerja dewasa membutuhkan pelatihan yang terhubung dengan kebutuhan industri, bukan kursus yang hanya menghasilkan sertifikat. Perusahaan, pemerintah, dan lembaga pendidikan harus berbagi tanggung jawab. Pelatihan perlu disertai akses transportasi, perangkat, dan waktu belajar.

Anak dari keluarga miskin menghadapi hambatan berlapis: gizi, lingkungan belajar, koneksi internet, dan jaringan sosial. Kebijakan pendidikan yang hanya menambah jumlah sekolah tidak cukup. Mutu guru, dukungan keluarga, kesehatan, dan akses ke pekerjaan harus diperhatikan.

Harapan antargenerasi adalah aset politik. Bila orang tua percaya anak akan hidup lebih baik, mereka cenderung mendukung institusi dan investasi. Bila harapan runtuh, pendidikan kehilangan daya legitimasi. Pertumbuhan yang serius harus mengukur apakah generasi muda memperoleh peluang yang lebih baik daripada generasi sebelumnya.

U. Peran Pemerintah Daerah dalam Menjaga Daya Beli

Pemerintah daerah berada paling dekat dengan biaya hidup warga. Mereka mengelola pasar, transportasi, perizinan, sebagian layanan dasar, dan program pemberdayaan. Koordinasi dengan pemerintah pusat diperlukan agar kebijakan harga dan bantuan tidak berjalan terpisah.

Daerah dapat menggunakan data pasar untuk mendeteksi tekanan harga dan gangguan pasokan. Namun, intervensi harus menghormati persaingan serta mencegah monopoli baru. Kemitraan dengan koperasi, petani, dan pelaku usaha lokal dapat memperpendek rantai pasok.

Kinerja daerah sebaiknya dinilai melalui perubahan akses dan kualitas hidup, bukan hanya serapan anggaran. Transparansi belanja dan forum warga membantu memastikan program menjawab kebutuhan.

V. Pekerjaan, Martabat, dan Identitas Politik

Pekerjaan memberi pendapatan, tetapi juga memberi identitas, hubungan sosial, dan rasa berguna. Kehilangan pekerjaan dapat dirasakan sebagai hilangnya kedudukan, bukan hanya hilangnya uang. Karena itu, program penempatan kerja perlu memperhatikan kecocokan keterampilan, lingkungan kerja, dan peluang berkembang.

Politik yang hanya menawarkan bantuan tanpa pekerjaan bermutu dapat menjaga ketergantungan. Politik yang hanya menyerahkan masalah kepada pasar mengabaikan hambatan awal. Negara perlu membangun ekosistem kerja yang memungkinkan warga memperoleh pendapatan sekaligus martabat.

Narasi pembangunan akan lebih kuat bila menampilkan pekerja, petani, pengusaha kecil, guru, tenaga kesehatan, dan perawat sebagai pelaku utama. Mereka bukan objek statistik, melainkan pencipta nilai ekonomi dan sosial.

W. Prinsip Evaluasi bagi Pembuat Kebijakan

Setiap kebijakan pertumbuhan perlu dievaluasi melalui tiga pertanyaan: apakah output meningkat, siapa memperoleh manfaat, dan apakah risiko dibagi secara adil? Pertanyaan pertama menjaga perhatian pada efisiensi; pertanyaan kedua memperhatikan distribusi; pertanyaan ketiga mempertimbangkan ketahanan.

Evaluasi juga harus melihat efek samping. Insentif investasi mungkin menciptakan pekerjaan tetapi mengurangi penerimaan; digitalisasi dapat meningkatkan produktivitas tetapi menghapus tugas rutin; pembangunan jalan dapat mempercepat logistik tetapi memindahkan beban lingkungan. Kebijakan yang matang menjelaskan pertukaran tersebut.

Jika evaluasi dibuka kepada publik, perdebatan ekonomi menjadi lebih substantif. Warga dapat menilai bukan hanya janji, melainkan alasan, bukti, dan hasil. Inilah dasar politik ekonomi yang dewasa.

P. Perbandingan antara Rata-rata dan Median

Rata-rata pendapatan dapat meningkat karena kenaikan pada kelompok berpendapatan tinggi, sementara median tidak bergerak sekuat itu. Perbedaan antara rata-rata dan median memberi petunjuk mengenai distribusi. Analisis publik perlu menjelaskan kedua ukuran agar pertumbuhan tidak dibaca sebagai pengalaman yang seragam.

Median lebih dekat dengan rumah tangga tipikal, tetapi tetap tidak menjelaskan biaya hidup dan aset. Dua keluarga dengan pendapatan median dapat memiliki keamanan berbeda karena perbedaan sewa, utang, kesehatan, dan tanggungan. Oleh karena itu, data pendapatan perlu dipadukan dengan ukuran kekayaan dan pengeluaran wajib.

Perbandingan antarwilayah juga penting. Pendapatan yang cukup di daerah dengan sewa rendah dapat tidak cukup di metropolitan. Kebijakan upah dan perlindungan harus memperhatikan struktur biaya lokal tanpa mengorbankan standar hak dasar.

Membuka perbedaan rata-rata dan median membantu komunikasi politik menjadi lebih jujur. Pemerintah tetap dapat menunjukkan kemajuan, tetapi juga mengakui kelompok yang belum merasakannya.

Q. Perlindungan Sosial dan Martabat Warga

Perlindungan sosial bukan belas kasihan. Ia merupakan mekanisme kolektif untuk menghadapi risiko yang tidak dapat ditanggung individu, seperti sakit, usia tua, pengangguran, kecelakaan, dan bencana. Ketika dirancang berbasis hak, perlindungan menjaga martabat serta mencegah warga jatuh ke dalam hubungan patronase.

Desain program harus menghindari stigma. Proses yang terlalu rumit atau pemeriksaan yang merendahkan dapat membuat warga enggan mengakses hak. Layanan satu pintu, informasi jelas, dan mekanisme banding meningkatkan keberterimaan. Digitalisasi harus dilengkapi jalur non-digital bagi warga yang kesulitan mengakses teknologi.

Perlindungan juga perlu mendukung transisi, bukan membekukan ketergantungan. Pelatihan, layanan penempatan, pembiayaan usaha, dan dukungan perawatan dapat dihubungkan dengan bantuan tanpa menjadikan penerima sebagai pihak yang disalahkan.

Masyarakat lebih bersedia mendukung pajak dan reformasi bila melihat perlindungan tersedia bagi semua yang membutuhkan. Inilah dasar solidaritas sosial dalam ekonomi yang berubah.

R. Institusi yang Mampu Belajar

Kebijakan ekonomi beroperasi dalam lingkungan yang berubah. Institusi tidak dapat hanya menjalankan prosedur lama; ia harus belajar dari hasil. Evaluasi bukan hukuman otomatis, melainkan cara membedakan program yang bekerja, program yang perlu diperbaiki, dan program yang harus dihentikan.

Pembelajaran membutuhkan data sebelum kebijakan berjalan. Target dan indikator perlu ditetapkan sejak awal, bukan setelah kritik muncul. Uji coba terbatas, evaluasi dampak, dan umpan balik pengguna dapat mengurangi risiko kebijakan berskala besar.

Birokrasi yang belajar memerlukan ruang untuk menyampaikan kegagalan. Jika setiap kegagalan dihukum tanpa membedakan kesalahan jujur dan korupsi, pejabat akan menyembunyikan masalah. Akuntabilitas tetap harus tegas terhadap penyalahgunaan, tetapi inovasi memerlukan ruang eksperimen.

Institusi yang belajar memperkuat legitimasi karena warga melihat koreksi. Pemerintah tidak harus selalu benar; ia harus mampu mengakui, memperbaiki, dan menjelaskan.

S. Politik Ekonomi untuk Indonesia 2045

Visi jangka panjang mengenai Indonesia maju harus diterjemahkan ke dalam pengalaman rumah tangga. Negara maju bukan hanya memiliki PDB besar, melainkan pekerjaan produktif, layanan universal, kota yang layak, desa yang berdaya, lingkungan sehat, dan institusi dipercaya.

Transformasi menuju pendapatan tinggi membutuhkan peningkatan produktivitas dan kualitas manusia. Investasi dalam riset, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur digital harus terhubung dengan industri domestik. Sekadar menjadi pasar teknologi atau pemasok bahan mentah tidak cukup.

Indonesia juga perlu mengantisipasi risiko perubahan iklim, geopolitik, dan otomatisasi. Strategi yang hanya mengejar pertumbuhan jangka pendek dapat menutup pilihan masa depan. Perencanaan harus memasukkan skenario dan kapasitas adaptasi.

Politik pembangunan 2045 harus menjadi kontrak antargenerasi. Warga hari ini memerlukan manfaat nyata, sedangkan generasi mendatang memerlukan aset, lingkungan, dan institusi yang tidak rusak. Pertumbuhan yang adil adalah cara menghubungkan keduanya.

T. Penegasan Akhir

Kegelisahan rakyat bukan gangguan terhadap narasi pertumbuhan; ia adalah umpan balik mengenai kualitas pertumbuhan. Pemerintah yang peka akan memakai keluhan untuk memperbaiki indikator, kebijakan, dan pelayanan. Pemerintah yang defensif akan menganggap keluhan sebagai serangan dan kehilangan informasi penting.

Perusahaan, partai, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat memiliki peran. Perusahaan menciptakan pekerjaan dan harus bertanggung jawab atas dampak. Partai menyusun agenda serta mengawasi pemerintah. Kampus memeriksa bukti. Masyarakat sipil membawa pengalaman kelompok yang sering tidak terlihat.

Dengan pembagian peran tersebut, pertumbuhan dapat ditempatkan dalam kerangka kesejahteraan dan demokrasi. Angka menjadi alat untuk memahami realitas, bukan alat untuk menutup perdebatan. Kebijakan menjadi kontrak yang dapat diuji, bukan janji yang berhenti pada pidato.

Ekonomi yang benar-benar tumbuh adalah ekonomi yang memperluas kemampuan warga untuk merencanakan masa depan dengan rasa aman dan martabat.

I. Perdagangan Global dan Kedaulatan Ekonomi

Keterbukaan perdagangan memberi akses pasar, teknologi, dan modal. Pada saat yang sama, ia membuat pekerja serta usaha domestik terpapar perubahan permintaan, tarif, dan rantai pasok. Ketika negara besar mengubah kebijakan industrinya, Indonesia harus menyesuaikan strategi tanpa kehilangan ruang untuk membangun kemampuan nasional.

Ekspor komoditas menghasilkan penerimaan, tetapi volatilitas harga dapat mengganggu anggaran dan pendapatan daerah. Diversifikasi produk dan pasar mengurangi risiko. Diversifikasi tidak berarti meninggalkan komoditas, melainkan menggunakan pendapatan komoditas untuk membangun industri, keterampilan, dan riset yang memperluas pilihan.

Kedaulatan ekonomi bukan autarki. Ia adalah kemampuan memilih hubungan internasional berdasarkan kepentingan publik, memiliki kapasitas produksi penting, dan tidak bergantung pada satu pemasok atau pembeli. Kerja sama investasi perlu disertai aturan transfer pengetahuan serta perlindungan lingkungan.

Warga menilai globalisasi melalui dampak lokal. Jika ekspor naik tetapi pekerjaan tidak aman dan harga rumah meningkat, keterbukaan dianggap menguntungkan pihak lain. Kebijakan perdagangan perlu disertai program penyesuaian bagi pekerja dan daerah yang terkena dampak.

J. Demografi, Bonus Penduduk, dan Beban Masa Depan

Bonus demografi sering disajikan sebagai peluang otomatis. Jumlah penduduk usia kerja memang dapat memperbesar produksi dan tabungan, tetapi hanya bila mereka memperoleh kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan lingkungan yang produktif. Jika tidak, bonus berubah menjadi tekanan pengangguran, informalitas, dan konflik antargenerasi.

Penduduk muda memerlukan ruang untuk masuk ke dunia kerja dan politik. Mereka tidak cukup diberi pelatihan motivasi; mereka memerlukan pasar yang menciptakan pekerjaan, akses modal, dan

kebijakan yang mengurangi biaya hidup. Kegagalan menyediakan itu memperbesar migrasi terpaksa dan frustrasi.

Penuaan penduduk akan meningkatkan kebutuhan perawatan dan pensiun. Kebijakan hari ini harus membangun sistem jaminan sosial sebelum beban menjadi terlalu besar. Produktivitas tidak boleh hanya mengandalkan jam kerja panjang; kesehatan dan keterampilan pekerja harus menjadi dasar.

Demografi juga terkait dengan legitimasi. Generasi muda menerima institusi bila melihat masa depan terbuka. Ketika mereka merasa bekerja keras tidak menghasilkan mobilitas, angka pertumbuhan kehilangan daya persuasif. Bonus demografi perlu diterjemahkan menjadi bonus kesempatan.

K. Implementasi Kebijakan dan Kesenjangan Pelaksanaan

Banyak kebijakan terlihat baik dalam dokumen tetapi lemah dalam pelaksanaan. Penyebabnya dapat berupa data yang tidak akurat, koordinasi antarinstansi, kapasitas daerah, anggaran yang terlambat, atau prosedur yang terlalu rumit. Warga menilai pemerintah pada titik pelayanan, bukan pada kualitas naskah kebijakan.

Implementasi memerlukan desain yang sederhana dan dapat dipantau. Indikator harus menunjukkan siapa yang bertanggung jawab, kapan hasil diharapkan, dan bagaimana keluhan diproses. Target yang tidak jelas memungkinkan organisasi mengklaim keberhasilan tanpa memperbaiki pengalaman warga.

Kebijakan pusat perlu memberi ruang adaptasi daerah, tetapi standar hak dan integritas harus tetap. Aparatur lokal membutuhkan pelatihan, data, dan sumber daya. Pengawasan harus membantu memecahkan masalah, bukan hanya mencari kesalahan setelah program gagal.

Kesenjangan implementasi merusak kepercayaan lebih cepat daripada kekurangan sumber daya yang dijelaskan secara terbuka. Warga dapat menerima keterbatasan jika pemerintah jujur dan menunjukkan perbaikan. Yang sulit diterima adalah janji besar yang tidak memiliki mekanisme pelaksanaan.

L. Ekonomi Informasi dan Kualitas Data Publik

Perdebatan ekonomi sering menjadi perdebatan mengenai data. Angka pertumbuhan, kemiskinan, pengangguran, dan inflasi memiliki definisi serta metode. Perbedaan hasil tidak selalu berarti salah satu pihak berbohong, tetapi publik perlu mengetahui batas pengukuran.

Data agregat sebaiknya disertai distribusi. Rata-rata nasional dapat dilengkapi dengan wilayah, gender, umur, pendidikan, dan status pekerjaan. Disagregasi membuat kelompok yang tertinggal terlihat dan mencegah kebijakan dirancang berdasarkan warga rata-rata yang sebenarnya tidak ada.

Keterbukaan data memerlukan metadata, seri waktu, dan penjelasan perubahan metodologi. Tanpa itu, angka dapat dipakai secara selektif. Perguruan tinggi, media, dan organisasi masyarakat dapat membantu menerjemahkan data menjadi informasi yang dapat dipahami.

Kualitas data juga memengaruhi layanan. Data penerima bantuan yang tidak diperbarui menimbulkan eksklusi atau tumpang tindih. Sistem digital harus memiliki mekanisme koreksi dan

jalur banding. Warga bukan sekadar objek perekaman; mereka berhak mengetahui serta memperbaiki informasi tentang dirinya.

M. Ruang Fiskal dan Pilihan Antarwaktu

Ruang fiskal adalah kemampuan pemerintah membiayai program tanpa mengorbankan stabilitas. Ia dipengaruhi oleh penerimaan, utang, bunga, pertumbuhan, dan kredibilitas. Perdebatan fiskal sering menyederhanakan pilihan menjadi hemat atau boros, padahal yang penting adalah komposisi dan hasil belanja.

Belanja pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan pemeliharaan dapat menghasilkan manfaat jangka panjang. Pemotongan pada bidang tersebut mungkin memperbaiki angka sesaat tetapi menurunkan produktivitas. Sebaliknya, program yang tidak terukur dapat membebani anggaran tanpa menghasilkan kapabilitas.

Utang dapat digunakan untuk investasi produktif. Masalah timbul bila utang membiayai konsumsi elite, proyek dengan manfaat rendah, atau kewajiban yang tidak transparan. Analisis harus melihat risiko kurs, bunga, dan pendapatan masa depan.

Keputusan fiskal perlu dibahas sebagai pilihan antargenerasi. Generasi sekarang memiliki hak memperoleh layanan, tetapi generasi mendatang juga berhak menerima lingkungan, aset publik, dan ruang fiskal. Transparansi membuat pembagian beban lebih dapat diterima.

N. Kepemimpinan Ekonomi dan Kejujuran Politik

Pemimpin ekonomi menghadapi tekanan untuk memberi kabar baik. Namun, komunikasi yang terlalu optimistis dapat memperbesar kekecewaan ketika warga tidak melihat perubahan. Kejujuran tidak berarti menyampaikan pesimisme; ia berarti menjelaskan kemajuan, risiko, kelompok yang belum terbantu, dan langkah perbaikan.

Kredibilitas tumbuh dari konsistensi. Pemerintah yang menetapkan target perlu menyampaikan indikator, jadwal, serta alasan perubahan. Bila kondisi global mengubah rencana, revisi harus disertai argumen. Mengubah target tanpa penjelasan membuat publik menganggap angka dirancang untuk memenangkan narasi.

Kepemimpinan juga perlu membangun koalisi sosial. Pengusaha, pekerja, petani, pemerintah daerah, akademisi, dan komunitas harus dilibatkan dalam desain. Konsultasi bukan sekadar formalitas. Masukan kelompok terdampak dapat memperbaiki kebijakan dan mengurangi biaya konflik.

Politik ekonomi yang dewasa tidak menjanjikan bahwa semua orang akan selalu puas. Ia menawarkan prosedur yang adil, perlindungan yang masuk akal, dan kesempatan memperbaiki keputusan. Rakyat dapat menerima hasil yang belum sempurna bila prosesnya dapat dipercaya.

O. Sintesis: Mengukur Pertumbuhan yang Dirasakan

Pertumbuhan yang dirasakan dapat dianalisis melalui hubungan antara lima lapisan. Lapisan pertama adalah aktivitas ekonomi: produksi, investasi, ekspor, dan konsumsi. Lapisan kedua adalah distribusi: siapa menerima pendapatan, aset, dan akses. Lapisan ketiga adalah keamanan: pekerjaan, kesehatan, perumahan, dan perlindungan sosial. Lapisan keempat adalah kapabilitas: pendidikan,

keterampilan, mobilitas, dan kemampuan memilih. Lapisan kelima adalah suara: partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas.

Jika aktivitas meningkat tetapi distribusi memburuk, kegelisahan akan bertahan. Jika distribusi membaik tetapi keamanan tidak ada, warga tetap takut jatuh. Jika keamanan tersedia tetapi kapabilitas tertutup, mobilitas sosial melemah. Jika layanan cukup tetapi suara tidak didengar, kepercayaan politik tetap rapuh.

Dashboard pemerintah perlu menampilkan hubungan antar lapisan. Misalnya, peningkatan investasi dapat dibaca bersama pekerjaan lokal, upah, dampak lingkungan, dan kualitas layanan. Program bantuan dapat dibaca bersama transisi penerima menuju pekerjaan produktif. Indikator tidak harus sempurna untuk berguna; yang penting adalah keterbukaan dan perbaikan berkelanjutan.

Sintesis tersebut mengubah makna keberhasilan. Ekonomi dianggap berhasil ketika warga tidak hanya melihat pabrik, angka ekspor, atau pertumbuhan PDB, tetapi juga merasakan bahwa kehidupan lebih aman, peluang lebih luas, dan keputusan publik lebih adil.

Glossarium

Daya beli. Kemampuan pendapatan rumah tangga membeli barang dan jasa setelah memperhitungkan perubahan harga.

Ekonomi politik. Kajian mengenai hubungan antara kekuasaan, institusi, kepentingan, dan proses ekonomi.

Formalisasi pekerjaan. Perubahan pekerjaan menuju status yang memiliki kontrak, perlindungan hukum, dan jaminan sosial.

Gini ratio. Ukuran ketimpangan distribusi pendapatan atau pengeluaran; nilai lebih tinggi menunjukkan ketimpangan lebih besar.

Inflasi. Kenaikan tingkat harga umum secara berkelanjutan dalam suatu perekonomian.

Kapasitas negara. Kemampuan pemerintah memungut penerimaan, membuat aturan, menyediakan layanan, dan melaksanakan kebijakan.

Kelas menengah. Kelompok rumah tangga dengan sumber daya di atas garis kemiskinan tetapi belum sepenuhnya aman dari guncangan.

Klientelisme. Pertukaran dukungan politik dengan manfaat material atau perlindungan melalui hubungan patron-klien.

Legitimasi. Penerimaan masyarakat terhadap hak pemerintah atau institusi untuk membuat keputusan.

Mobilitas sosial. Perubahan posisi ekonomi atau sosial individu maupun keluarga antargenerasi atau sepanjang hidup.

PDB. Nilai barang dan jasa akhir yang diproduksi dalam wilayah ekonomi selama periode tertentu.

Pekerjaan bermutu. Pekerjaan yang memberikan pendapatan layak, keamanan, perlindungan, hak, dan kesempatan berkembang.

Perlindungan sosial adaptif. Sistem bantuan dan jaminan yang dapat menyesuaikan diri terhadap krisis, perubahan harga, dan risiko baru.

Pertumbuhan inklusif. Pertumbuhan yang memperluas kesempatan dan manfaat kepada kelompok serta wilayah yang luas.

Produktivitas. Jumlah output yang dihasilkan dari satu unit input, terutama tenaga kerja atau modal.

Redistribusi. Pemindahan sumber daya melalui pajak, transfer, dan layanan untuk mengurangi ketimpangan.

Transisi ekologis. Perubahan menuju kegiatan ekonomi rendah emisi dan lebih tahan terhadap perubahan iklim.

Informalitas. Keadaan ketika pekerjaan atau usaha berada di luar sebagian perlindungan dan pencatatan formal.

Keamanan ekonomi. Kemampuan rumah tangga mempertahankan kebutuhan hidup dan menghadapi guncangan.

Populisme. Gaya politik yang menempatkan rakyat sebagai satu kesatuan moral dan elite sebagai lawan utama.

Kapabilitas. Kemampuan nyata seseorang memilih dan menjalani kehidupan yang dianggap bernilai.

Oligarki. Konsentrasi kekayaan dan pengaruh politik pada kelompok kecil.

Daftar Pustaka

- Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2012). *Why nations fail: The origins of power, prosperity, and poverty*. Crown.
- Acemoglu, D., & Restrepo, P. (2018). Artificial intelligence, automation and work. In A. Agrawal, J. Gans, & A. Goldfarb (Eds.), *The economics of artificial intelligence*. University of Chicago Press. <https://doi.org/10.1257/jep.32.2.3>
- Autor, D. H. (2015). Why are there still so many jobs? The history and future of workplace automation. *Journal of Economic Perspectives*, 29(3), 3–30. <https://doi.org/10.1257/jep.29.3.3>
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Indikator ekonomi dan sosial Indonesia*. <https://www.bps.go.id/>
- Deaton, A. (2013). *The great escape: Health, wealth, and the origins of inequality*. Princeton University Press.
- Hall, P. A., & Taylor, R. C. R. (1996). Political science and the three new institutionalisms. *Political Studies*, 44(5), 936–957. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9248.1996.tb00343.x>
- International Labour Organization. (2024). *World employment and social outlook: Trends 2024*. ILO. <https://www.ilo.org/>
- Kuznets, S. (1955). Economic growth and income inequality. *The American Economic Review*, 45(1), 1–28. <https://www.jstor.org/stable/1811581>
- Milanovic, B. (2016). *Global inequality: A new approach for the age of globalization*. Harvard University Press.

- North, D. C. (1990). *Institutions, institutional change and economic performance*. Cambridge University Press.
- OECD. (2024). *OECD economic surveys: Indonesia 2024*. OECD Publishing.
<https://doi.org/10.1787/de87555a-en>
- Pierson, P. (2000). Increasing returns, path dependence, and the study of politics. *American Political Science Review*, 94(2), 251–267. <https://doi.org/10.2307/2586011>
- Rodrik, D. (2016). Premature deindustrialization. *Journal of Economic Growth*, 21, 1–33.
<https://doi.org/10.1007/s10887-015-9122-3>
- Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Oxford University Press.
- Standing, G. (2011). *The precariat: The new dangerous class*. Bloomsbury Academic.
- Stiglitz, J. E. (2012). *The price of inequality*. W. W. Norton.
- World Bank. (2025). *Indonesia economic prospects: December 2025*. World Bank.
<https://openknowledge.worldbank.org/entities/publication/2181f2fe-62c4-4a7c-b38d-d940dd673530>
- World Bank. (2026). *Indonesia economic prospects: June 2026*. World Bank.
<https://openknowledge.worldbank.org/entities/publication/ffaeef27-ed9b-491a-b4e4-350c6129edb6>
- World Bank. (2024). *World development report 2024: The middle-income trap*. World Bank.
<https://doi.org/10.1596/978-1-4648-2076-1>
- Woolcock, M. (1998). Social capital and economic development: Toward a theoretical synthesis. *Theory and Society*, 27(2), 151–208. <https://doi.org/10.1023/A:1006884930135>

Lampiran: Kerangka Evaluasi Politik Ekonomi

Untuk mengevaluasi apakah pertumbuhan benar-benar diterjemahkan menjadi kesejahteraan, analisis dapat memakai enam pertanyaan. Pertama, siapa yang memperoleh pendapatan dan aset baru? Kedua, apakah pekerjaan yang tercipta aman, produktif, dan memiliki jalur peningkatan keterampilan? Ketiga, apakah harga kebutuhan, perumahan, kesehatan, dan pendidikan dapat dijangkau? Keempat, apakah rumah tangga memiliki perlindungan ketika terjadi guncangan? Kelima, apakah kebijakan mengurangi atau memperbesar kesenjangan antarwilayah dan antarkelompok? Keenam, apakah warga memiliki ruang untuk memengaruhi keputusan serta meminta pertanggungjawaban? Kerangka ini membantu menghubungkan indikator makro dengan pengalaman sosial tanpa menolak pentingnya pertumbuhan.

Dalam pengajaran manajemen dan ekonomi politik, mahasiswa dapat menyusun dashboard “pertumbuhan yang dirasakan” untuk satu daerah. Variabelnya dapat mencakup PDRB, upah riil, pekerjaan formal, harga pangan, biaya sewa, waktu tempuh, akses kesehatan, dan persepsi kepercayaan. Data kuantitatif perlu dilengkapi wawancara agar angka tidak terlepas dari konteks. Tugas semacam ini mengajarkan bahwa pengambilan keputusan publik memerlukan bukti, empati institusional, dan kemampuan membaca distribusi.